

Kertas Kebijakan

Upaya Peningkatan Produktivitas Kakao di Kabupaten Sikka



FORDFOUNDATION



FORD FOUNDATION

KERTAS KEBIJAKAN

Upaya Peningkatan Produktivitas Kakao di Kabupaten Sikka

KERJASAMA ANTARA:

KPPOD dan Pemerintah Kabupaten Sikka
didukung oleh
FORD FOUNDATION

Jakarta 2013

Tim Peneliti KPPOD:

Ig. Sigit Murwito
Sri Mulyati

2013



Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Gd. Permata Kuningan Lt.10
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C
Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
Telp: +62 21 8378 0642/53, Fax.: +62 21 8378 0643

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	ii
Daftar Tabel	ii
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	1
C. Identifikasi Tujuan.....	4
D. Alternatif Tindakan	5
E. Analisis Manfaat - Biaya	6
F. Alternatif Terpilih	10
G. Strategi Implementasi	10

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.	Pohon Masalah Pengembangan Kakao di Sikka	2
Tabel 1.	Perumusan Masalah Pengembangan Kakao Sikka	2
Tabel 2.	Identifikasi Tujuan.....	4
Tabel 3.	Skor Indeks Manfaat dan Biaya	7
Tabel 4.	Ringkasan Biaya dan Manfaat	7
Tabel 5.	Strategi Implementasi.....	10
Tabel 6.	Metodologi Konsultasi Publik.....	12

A. LATAR BELAKANG

Kakao (*Theobroma cacao*) yang artinya Santapan Dewata merupakan komoditi strategis karena disamping merupakan komoditi perdagangan internasional yang memiliki nilai yang tinggi, juga karena kegiatan usaha ini 95% melibatkan petani kecil. Di Kabupaten Sikka, masyarakat telah mengenal kakao sejak tahun 1960-an. Awal dekade 1970 pusat produksi kakao hanya di Kecamatan Kewapante dan Kecamatan Bola, sekarang berkembang menjadi tanaman perkebunan utama di 17 dari 21 kecamatan (kecuali Kec. Alok, Alok Barat, dan Magepanda). Sikka kemudian menjadi penghasil kakao terbesar di NTT.

Kakao di Sikka merupakan komoditi penyumbang pendapatan utama bagi petani. Jumlah petani Kakao di Sikka sebanyak 33.278 kepala keluarga (Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan, dan Perkebunan - Distanbun: 2011). Namun demikian usaha perkebunan Kakao di Sikka masih dalam skala usaha pertanian tradisional. Lahan untuk budidaya kakao dimiliki oleh petani secara pribadi (keluarga), dengan rata-rata tingkat kepemilikan lahan kurang dari 0,5 Ha. Hanya 7% petani yang memiliki lahan lebih dari 1, dan hanya 10% petani yang memiliki lahan 1 ha atau lebih. Total lahan yang digunakan untuk budidaya kakao hingga tahun 2012 mencapai 22.257 ha.

Luas kepemilikan lahan kakao petani semakin hari semakin berkurang sebagai akibat desakan demografis. Peningkatan luas kebun kakao sudah tidak memungkinkan lagi, kecuali mengganti jenis tanaman lain yang sudah ada dengan tanaman kakao. Pemda tidak memiliki kebijakan untuk mempertahankan luas usaha kakao, atau menyediakan lahan untuk pengembangan usaha kakao di Sikka. Dengan demikian produksi kakao di Sikka cenderung stagnan bahkan menurun.

Sampai dengan tahun 2003 rata-rata produksi kakao di Sikka mencapai 14.333,2 ton/tahun dengan nilai nominal Rp.372.663.200.000,-. Namun mulai tahun 2004 produksi kakao terus menurun hingga 54% atau hanya sebesar 7.739,93 ton. Pada tahun 2012 dari total luas lahan sebesar 22.257 Ha total produksi hanya sebesar 7.151 ton. Meski demikian luas lahan dan produksi kakao Sikka masih tertinggi di NTT. Produksi kakao NTT tahun 2012 mencapai 12.978 ton (menduduki peringkat ke-5 secara Nasional), dengan luas areal 46.245 ha. Artinya sumbangan Sikka terhadap produksi kakao di NTT mencapai 55,1%, sedangkan luas lahan sikka adalah 48,1% dari luas lahan kakao di NTT. Meski sumbangan terhadap

produksi kakao di NTT adalah yang terbesar dibandingkan daerah lainnya, namun rata-rata produktivitas tanaman kakao di Sikka hanya sebesar 321 kg/ha/tahun jauh dibawah rata-rata nasional yang mencapai 900 kg/ha/tahun.

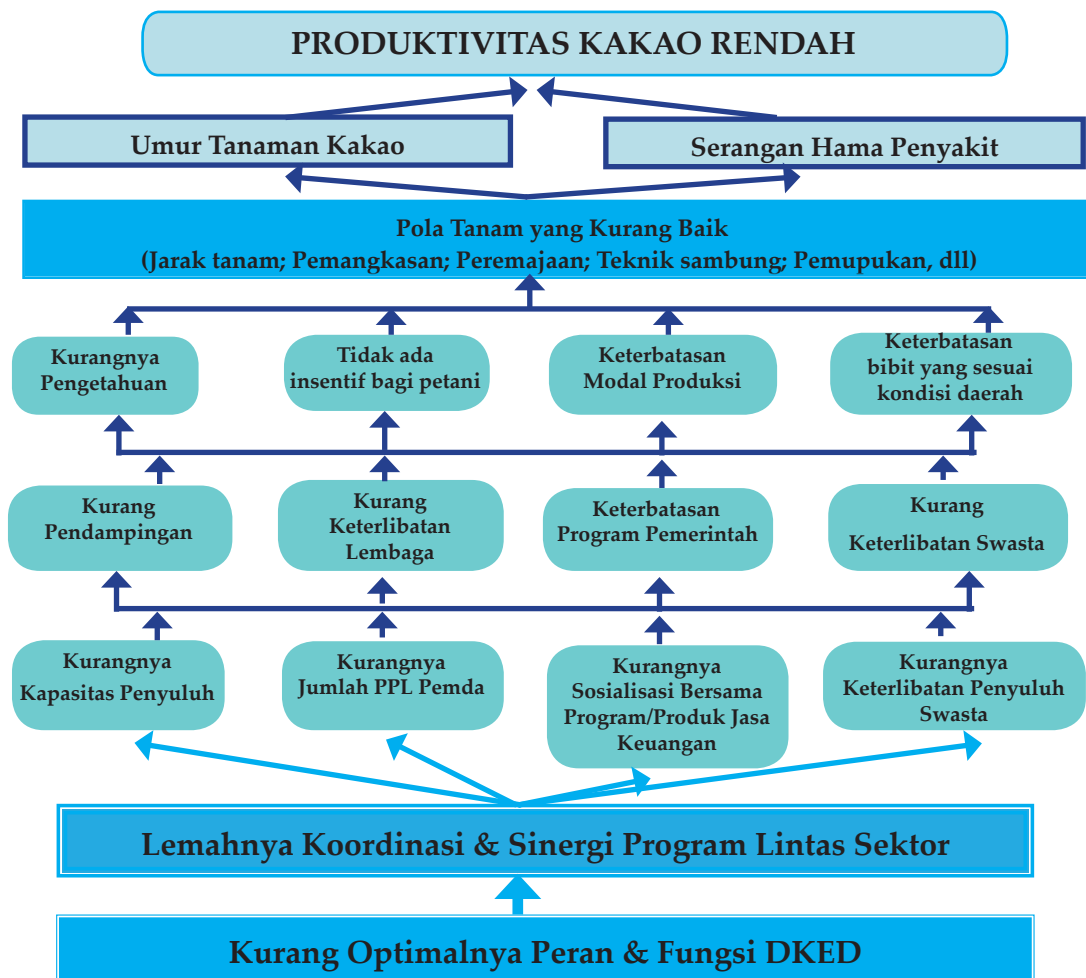
Penurunan produksi kakao tersebut setara dengan kehilangan PDRB Rp.201,2 Milyar per tahun. Kehilangan PDRB sebesar itu mengakibatkan penurunan aktivitas *multiplier effect* roda perekonomian di Sikka berupa penurunan konsumsi barang dan jasa, produksi menurun, serapan tenaga kerja dan bahan baku menurun, distribusi pendapatan masyarakat dan akhirnya masyarakat di sentra kakao terpukul. Pengaruh penurunan produktivitas kakao di Sikka sangat besar karena kontribusi komoditi ini terhadap PDRB Sikka mencapai 8,46%(bersama dengan komoditi perkebunan lainnya).

Identifikasi awal beberapa penyebab terjadinya penurunan produktivitas tanaman kakao antara lain adalah faktor umur kakao sudah tua, sebagian besar sudah lebih dari 30 – 45 tahun. Selain itu juga terjadinya ledakan organisme pengganggu tanaman (OPT), dan pola tanam yang tidak mengikuti cara bercocok tanam yang baik (*Good Agricultural Practicess-GAP*).

Pemda selama ini mencanangkan bisnis pertanian kakao sebagai salah satu motor penggerak ekonomi daerah, namun tidak banyak memiliki program kongkrit dalam pengembangan pertanian kakao. Koordinasi antar instansi terkait dalam pengembangan kakao juga dirasakan belum optimal, akibatnya pelaksanaan program yang minim tersebut juga kurang efektif. Usaha kakao dibiarkan tumbuh sendiri tanpa dukungan yang signifikan dari pemda. Akibatnya perkembangan usaha kakao kurang optimal dan cenderung terus mengalami penurunan. Untuk itu harus ada kebijakan dan program kegiatan yang kongkrit untuk mendorong pertumbuhan usaha kakao di Sikka.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari sekian banyak persoalan dalam pengembangan usaha kakao di Sikka, secara umum permasalahan utamanya adalah **rendahnya produktivitas dan cenderung mengalami penurunan**. Dari konsultasi dengan para *stakeholders* di Sikka, akar masalah dari rendahnya produktivitas kakao di Sikka dikelompokkan menjadi dua faktor utama, yakni: (1)Tanaman kakao tua;dan (2)Serangan hama dan penyakit. Persoalan terkait dengan rendahnya produktivitas tanaman kakao di Sikka dapat digambarkan dengan pohon masalah disamping.



Masing-masing faktor tersebut terjadi karena beberapa hal yang saling terkait, dan ada beberapa pihak yang memiliki perilaku yang dapat memicu permasalahan terjadi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel perumusan masalah di bawah ini:

Tabel 1. PERUMUSAN MASALAH				
1) Masalah	Produktivitas tanaman kakao rendah.			
2) Identifikasi Akar Masalah:	Penyebab	Pihak/Perilaku/Motivasi yang Berpengaruh		
		Aktor yang Terlibat	Perilaku Menyumbang	Motivasi
2.1 Tanaman kakao tua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum banyak Petani yang melakukan perawatan kebun secara baik (Good Agricultural Practicess-GAP). 2. Kurangnya pengetahuan petani untuk melakukan peremajaan dan perawatan kebun. 3. Tidak adanya insentif/subsidi dari pemda bagi petani yang memangkas/menebang pohon, sehingga khawatir sumber pendapatannya akan hilang setelah pohonnya ditebang. 4. Kesulitan mendapatkan bibit yang sesuai dengan kondisi Sikka. 5. Kekurangan sarana prasarana produksi dan modal usaha. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petani 2. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan (Distanbun) 3. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKP2) 4. Dewan Koordinasi Ekonomi Daerah (DKED) 5. Dinas Koperasi dan UKM 6. Lembaga keuangan Perbankan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pendampingan dari Distanbun masih terbatas. 2. Petugas PPL di BKP2 minim dalam hal kapasitas dan jumlah pendamping. 3. Jumlah PPL Distanbun terbatas. 4. Kurangnya sinergi program antara Distanbun dengan BKP2. 5. Desain kelembagaan yang menangani perkebunan hanya merupakan satu bagian di Distanbun bersama dengan pertanian tanaman pangan, perikanan, kehutanan, dll secara umum dirasa kurang mendukung. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petani beranggapan menebang pohon adalah tabu karena ikatan emosional yang kuat dengan tanaman yang telah memberikan penghidupan kepadanya, selain itu ada kekhawatiran bila menebang pohon akan kehilangan pendapatan selama pohon yang baru belum berproduksi. 2. Pendampingan yang dilakukan oleh PPL disesuaikan dengan keterbatasan dari sisi jumlah dan kapasitas PPL, serta sifat PPL yang polivalen/ umum dan ketersediaan anggaran. 3. Desain kelembagaan Distanbun menyebabkan kurang leluasa untuk pengembangan kakao khususnya untuk penyusunan program dan alokasi anggaran

<p>2.2. Serangan hama dan penyakit</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mayoritas Tanaman Kakao sudah tua. 2. Pola tanam yang kurang baik 3. Kesadaran petani untuk merawat kebun & melakukan pemupukan rendah. 4. Kurangnya pengetahuan petani akan budidaya tanaman yang baik. 5. Minimnya pendampingan kepada petani oleh petugas PPL karena keterbatasan kapasitas (ketersediaan dan kemampuan/pengetahuan karena PPL yang ada bersifat umum). 6. Keterbatasan kapasitas dan jumlah PPL sehingga program sambung samping dan sambung pucuk beberapa mengalami kegagalan. 7. Keterbatasan modal produksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petani 2. Distanbun 3. BKP2 4. DKED 5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 6. Dinas Koperasi dan UKM 7. Lembaga Keuangan Perbankan 8. Lembaga Keuangan Koperasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petani tidak melakukan perawatan kebun dengan baik, salah satunya seperti penggunaan pupuk yang tidak tepat. 2. Ketiadaan pupuk khusus untuk kakao di Sikka, sementara pupuk formula khusus untuk kakao tidak dijual bebas. 3. Pendampingan BKP2/PPL kepada petani untuk membuat pupuk organik belum optimal. 4. Kurang koordinasi pelaksanaan program antara Distanbun, BKP2, LSM (dalam DKED), seperti dalam hal penggunaan PPL misalnya. 5. Belum optimalnya koordinasi Pemda dengan lembaga keuangan dalam menyediakan modal produksi mengakibatkan belum efektif dalam sosialisasi program dan informasi tidak sampai kepada petani. 6. Lemahnya kelembagaan ekonomi petani baik yang berupa kelompok tani maupun yang berupa koperasi baik dari sisi kapasitas maupun kekuatan hukum (legal formal), 7. Minimnya pendampingan dan pelatihan yang dilakukan oleh Distanbun dan BKP2 pada program-program bantuan yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya: bantuan sarana dan prasarana produksi tanpa disertai pelatihan yang memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian petani tidak melakukan perawatan karena tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk membeli saprodi. 2. Sebagian Petani melakukan pemupukan tidak dengan cara yang tepat, baik dosis dan waktu pelaksanaannya, sehingga hasilnya kurang optimal. 3. Petani menanam kakao tanpa memperhatikan jarak antar tanaman, pemangkasan, dan perawatan sanitasi kebun secara teratur sehingga kakao rentan terkena hama. 4. Program pendampingan petani yang dilakukan oleh Distanbun dan BKP2 dilakukan sebatas ketersediaan anggaran dan ketersediaan jumlah dan kapasitas PPL yang ada. 5. Kurangnya koordinasi antara Distanbun dan BKP2 salah satunya karena masih adanya ego sektoral. Untuk suatu urusan tertentu, di satu sisi masing-masing pihak merasa yang berwenang, untuk urusan yang lain menganggap merupakan kewenangan pihak yang lain. 6. Pelaksanaan pendampingan dilakukan sebatas proyek sehingga tidak ada program yang keberlanjutan, misal pemberian bantuan dengan pendampingan. 7. Lembaga keuangan kurang percaya akan kemampuan petani untuk mengelola keuangan yang bersumber dari pinjaman. Perilaku juga terjadi karena kurangnya koordinasi lembaga keuangan dengan Pemda dan ketiadaan jaminan dan penjamin.
<p>3) Pengaruh terhadap petani kakao</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Buah/biji kakao yang dihasilkan kurang baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. • Petani tidak memiliki posisi tawar yang baik terkait dengan harga jual kakao. • Pendapatan petani rendah dan kesejahteraan petani kurang. • Berkurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani kakao (regenerasi kurang berjalan). 			
<p>4) Persepsi stakeholders</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Petani belum memiliki pengetahuan yang baik untuk melakukan peremajaan dan perawatan tanaman kakao. Masih terbatasnya kesadaran petani dan terbatasnya program pendampingan yang dilakukan. Masih ada nilai tabu untuk melakukan pemangkasan terhadap tanaman yang sudah tua, selain itu keenganan juga terjadi karena tidak ada jaminan (subsidi) selama tanaman belum menghasilkan. • Distanbun dan BKP2 masih belum optimal dalam melakukan pendampingan kepada petani dikarenakan keterbatasan jumlah PPL dan belum adanya sinergi program yang baik antar SKPD terkait. Selain itu koordinasi diantara kedua instansi tersebut juga masih kurang karena adanya ego sektoral. • Desain kelembagaan Distanbun dianggap kurang memberikan ruang dalam penyusunan program dan anggaran pelaksanaan program. Hal tersebut juga berdampak pada terhambatnya alur koordinasi antara Distanbun dengan BKP2. • Lembaga keuangan masih belum banyak memberikan kepercayaan kepada petani untuk mengakses kredit dikarenakan belum adanya jaminan dan penjamin yang dimiliki petani. Selain itu sosialisasi program atau produk layanan lembaga keuangan untuk petani kurang tersosialisasikan dengan baik. • DKED belum optimal dalam menjalankan perannya sebagai wadah koordinasi stakeholder kakao yang tergabung dalam anggotanya. Hanya bagian-bagian tertentu dalam DKED yang sudah berjalan dengan baik. 			

C. IDENTIFIKASI TUJUAN

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka tujuan umum yang hendak dicapai adalah **“Meningkatkan Produktivitas Tanaman Kakao di Sikka”**. Sementara beberapa tujuan khusus untuk mewujudkan tujuan umum tersebut antara lain adalah melalui perubahan perilaku dari *stakeholder*/aktor yang berperan dalam kegiatan usaha kakao. Tujuan-tujuan khusus yang diharapkan dapat merubah perilaku *stakeholder* yang mendorong peningkatan produktivitas kakao di Sikka, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran petani dalam melakukan perawatan tanaman kakao secara baik,
 2. Mendorong Petani agar aktif tergabung dan terlibat dalam poktan dan organisasi ekonomi petani (koperasi),
 3. Mendorong lembaga keuangan (Bank) memberikan kemudahan (skema) kredit bagi petani dan intensif dalam mensosialisasikan program-program untuk petani kakao,
 4. Mendorong terjalannya kerjasama antara lembaga keuangan dengan Pemda dalam menyediakan modal produksi kepada petani sebagai insentif bagi petani untuk melakukan perawatan tanaman kakao secara baik,
 5. Meningkatkan peran BKP2 untuk lebih intensif melakukan penyuluhan dan pendampingan terhadap petani untuk mempraktikkan *GAP (Good Agricultural Practises)*,
 6. Meningkatkan peran Distanbun dalam menjalankan fungsi perencanaan dan implementasi program pemberdayaan petani kakao dengan lebih baik melalui borkoordinasi yang baik dengan BKP2,
 7. Mendorong Dinas KUKM untuk membuat program atau menjadi avalis/penjamin bagi petani kakao,
 8. Mengoptimalkan peran DKED dalam menjalankan fungsi koordinasi antar *stakeholder* khususnya dalam rangka peningkatan produktivitas kakao.
- Berikut adalah identifikasi dari tujuan perumusan kebijakan peningkatan produktivitas kakao:

Tabel 2 Identifikasi Tujuan	
1) Bagian masalah yang ingin diselesaikan: RENDAHNYA PRODUKTIVITAS TANAMAN KAKAO	
2) Sasaran yang ingin dicapai: MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS TANAMAN KAKAO	
3) Pelaku dan Perilaku:	
a). Pelaku utama (key players)	<ol style="list-style-type: none"> 1.Petani 2.Lembaga Keuangan/Perbankan 3.Koperasi 4.Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan 5.Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian (BKP2) 6.Dinas KUKM 7.DKED 8.LSM
b). Perilaku yang diinginkan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Petani melakukan perawatan tanaman kakao secara baik, 2.Petani aktif tergabung dan terlibat dalam poktan dan organisasi ekonomi petani (koperasi) 3.Lembaga keuangan (Bank) memberikan kemudahan (skema) kredit bagi petani dan intensif dalam mensosialisasikan program-program untuk petani kakao. 4.Lembaga keuangan bekerjasama dengan Pemda menyediakan modal produksi kepada petani sebagai insentif bagi petani untuk melakukan penebangan pohon dan peremajaan tanaman kakao. 5.BKP2 lebih intensif melakukan penyuluhan dan pendampingan terhadap petani untuk mempraktikkan <i>GAP (Good Agricultural Practises)</i> 6.Distanbun menjalankan fungsi perencanaan dan implementasi program pemberdayaan petani kakao dengan lebih baik melalui borkoordinasi yang baik dengan BKP2 7.Dinas KUKM menjadi avalis/penjamin bagi petani kakao. 8. DKED lebih optimal dalam menjalankan fungsi koordinasi antar stakholder khususnya dalam rangka peningkatan produktivitas kakao
4) Faktor yang Mendorong dan Mengambat:	
a) Pihak yang dapat membantu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program/Dana Pemerintah Pusat 2. Program/Dana Pemprov NTT 3. Komitmen dari Bupati 4. DKED: dapat lebih optimal memerankan fungsi koordinasi antar <i>stakeholder</i> kakao dalam upaya pemberdayaan petani kakao. 5. NGO 6. Gereja: Memberikan pemahaman dan penyadaran akan pentingnya merawat kebun.
b) Pihak yang dapat menghambat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbankan, ketatnya persyaratan formal dalam penyaluran kredit bagi petani kakao (menyulitkan petani untuk memenuhi ketentuan administratif/formal). 2. Pedagang pengumpul dan/atau tengkulak yang menawarkan persyaratan yang lebih ringan dari perbankan maupun koperasi.
c) Faktor yang mendorong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keinginan kuat dari sebagian petani untuk meningkatkan taraf hidup dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan. 2. Komitmen dari Bupati dan Wakil Bupati: tercermin dalam Visi dan Misi: “Sika Satu yang Mandiri dan Sejahtera”, selain itu juga bertepatan dengan penyusunan RPJMD sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu materi dalam RPJMD 3. Dukungan dari DPRD 4. Keberadaan DKED sebagai forum komunikasi dan koordinasi <i>stakeholder</i> kakao. 5. Keberadaan program-program kegiatan NGO untuk pelatihan, penguatan kapasitas, dan pendampingan petani kakao.
d) Faktor yang menghambat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberatan petani untuk melakukan pemotongan, peremajaan tanaman kakao yang sudah tua karena ikatan emosional dan nilai-nilai (budaya) petani terhadap tanaman kakao yang merupakan warisan dan kontribusi bagi kehidupan mereka. 2. Desakan kebutuhan petani akan cash money 3. Persyaratan formal untuk mengakses permodalan di lembaga keuangan (perbankan). 4. Ketiadaan jaminan dari petani untuk mengakses perbankan. 5. Kemampuan anggaran Pemda Kab. Sikka untuk dialokasikan bagi kegiatan pembinaan dan penyuluhan.

D. ALTERNATIF TINDAKAN

Untuk mencapai tujuan kebijakan peningkatan produktivitas tanaman kakao di Sikka, maka dirumuskan berbagai alternatif tindakan non-regulasi dan regulasi. Alternatif tindakan non-regulasi yang relevan untuk dilakukan diantaranya adalah merancang program-program kegiatan untuk peningkatan kapasitas petani dan kelompok tani, peningkatan kapasitas dan jumlah petugas penyuluh lapangan, dan optimalisasi koordinasi berbagai instansi terkait melalui DKED. Sementara alternatif regulasi yang dianggap relevan yakni memperkuat/merumuskan payung hukum dari keberlanjutan setiap program pengembangan kakao maupun memperkuat kapasitas institusi DKED agar lebih optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Berdasarkan alternatif tindakan yang ada maka masing-masing opsi dianalisis biaya dan manfaatnya, yakni sebagai berikut:

I. Do Nothing/Membiarkan Kondisi yang ada:

Apabila opsi ini dipilih maka usaha perkebunan kakao di Sikka tidak akan berkembang, produktivitas tanaman kakao tetap rendah, banyak tenaga kerja di pedesaan yang menganggur tidak terserap, pendapatan petani dan pedagang tidak meningkat. Pada akhirnya tidak terjadi percepatan perputaran perekonomian tidak optimal.

II. Penguatan kapasitas Petani dan Kelembagaan Petani:

Penguatan kapasitas petani dan kelembagaan petani menjadi suatu alternatif mengingat bahwa salah satu penyebab rendahnya produktivitas tanaman kakao adalah pola tanam dan tingkat pengetahuan petani yang masih rendah. Petani juga kurang memiliki akses dan kemampuan finansial sebagai modal usaha/produksi. Hal ini terjadi juga karena kelembagaan ekonomi petani masih lemah dan perlu untuk dikuatkan baik kemampuan maupun legalitasnya. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan dan program untuk penguatan kapasitas petani dan kelembagaan petani. Beberapa kegiatan atau program yang dapat dilakukan dalam rangka penguatan kapasitas petani dan kelembagaan petani, seperti:

- Pelatihan petani untuk bertani kakao secara baik (GAP); antara lain melalui menyediakan anggaran untuk pelatihan dan studi banding;
- Memperkuat kelembagaan petani dari sisi kemampuan maupun kekuatan legalitasnya (badan hukum);
- Memperkuat dan mempertajam proram pemberdayaan petani dan kelompok tani; dan sebagainya.

III. Penguatan kapasitas dan jumlah PPL:

Salah satu penyebab rendahnya kapasitas petani adalah kurangnya pendampingan dari tenaga penyuluh (PPL) baik yang berada di BKP2 maupun yang ada di Distanbun. Persoalan lainnya adalah adanya keterbatasan dari tenaga PPL yang ada, baik dari sisi jumlah maupun kemampuan. Hal ini juga disebabkan PPL yang ada masih bersifat polivalen dan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dengan demikian penguatan atas kapasitas dan jumlah PPL, diyakini oleh *stakeholder* sebagai salah satu solusi untuk mengatasi persoalan rendahnya produktivitas kakao di Sikka.

Beberapa kegiatan atau program yang dapat dilakukan dalam rangka penguatan kapasitas dan jumlah PPL, diantaranya seperti:

- Penguatan kapasitas optimalisasi PPL yang ada secara fungsional di semua tingkatan pemerintahan;
- Penguatan dan restrukturisasi kelembagaan Distanbun; dan sebagainya.
- Meningkatkan koordinasi Distanbun dengan BKP2;
- *Training of Trainer* (TOT) dan sekolah lapang bagi PPL dan penambahan jumlah PPL minimal 1 orang satu desa;
- Optimalisasi peran penyuluh swadaya di masing-masing desa;

IV. Revitalisasi DKED melalui perubahan dasar hukum:

Dari hasil konsultasi publik, salah satu akar masalah rendahnya produktivitas tanaman kakao di Sikka adalah kurangnya koordinasi program-program pengembangan dan implementasi program diantara para *stakeholder*. Peningkatan dan optimalisasi koordinasi antar pihak diperlukan untuk upaya-upaya peningkatan produktivitas kakao di Sikka. Sesungguhnya di Sikka sudah ada satu institusi yang berfungsi untuk mengkoordinasikan *stakeholder*, baik dari unsur pemerintah, swasta, petani, LSM dan sebagainya dalam rangka pembangunan ekonomi, yakni DKED. DKED dibentuk berdasarkan SK Bupati No.245/HK/2012 tentang Pembentukan Dewan Kerjasama Ekonomi Daerah (DKED) Kab. Sikka. Dalam DKED ini dibentuk Forum Kakao Sikka, yang berfungsi untuk mencari solusi permasalahan dari usaha kakao. Mengingat strategisnya peran DKED, maka revitalisasi DKED melalui penguatan dasar hukum menjadi relevan sebagai salah satu opsi tindakan.

Sebagai gambaran berikut ini adalah peran dari DKED:

- Memberikan masukan, usul-saran permasalahan ekonomi daerah serta berperan dalam merumuskan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian;
- Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, memfasilitasi kajian-kajian potensi dan peluang perekonomian lokal untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat;
- Menjadi mediator antara BUMN/BUMD, swasta dan *stakeholders* dalam rangka pengembangan ekonomi daerah dan;
- Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program umum perekonomian daerah.

Revitalisasi DKED dapat dilakukan dengan membuat Perda/Perbub yang didalamnya antara lain untuk: Memperjelas, Mempertegas, dan Memperluas cakupan/fungsi, Struktur, Kewenangan DKED.

Dari alternatif tindakan yang dirumuskan diatas, ada dua kebijakan bukan pengaturan dan satu tindakan regulasi yang dapat dilakukan. Proses *screening* terhadap tiga alternatif di atas tidak dilakukan karena keduanya dapat dilakukan dari satu peraturan, yaitu:

1. Meningkatkan anggaran belanja pemerintah untuk pembiayaan aspek legal, pembinaan petani, kelompok tani, petugas penyuluh (sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, pendidikan, dan sebagainya), dan pengembangan usaha pembiayaan mikro di tingkat petani.
2. Pengalokasian anggaran oleh Pemda atau instansi terkait serta memfasilitasi agar petani kakao lebih mudah memperoleh pinjaman dari lembaga pembiayaan.
3. Kebijakan lain, baik dalam bentuk Perda/Perbub, maupun berupa program disusun berdasarkan pada dua alternatif tindakan yang digabung sebagai berikut: Pemerintah menetapkan mekanisme proses pembinaan kepada petani kakao, kelompok tani melalui penyediaan informasi, pengembangan usaha (manajemen, pemasaran dan teknologi), pelatihan dan subsidi. Selain itu program peningkatan kapasitas dan jumlah PPL juga harus dilakukan. Aturan main tersebut kemudian dijadikan dasar aturan main masing-masing *stakeholder* yang terlibat dan tergabung dalam DKED.

E. ANALISIS MANFAAT-BIAYA

Dalam metode RIA, langkah penting untuk menentukan alternatif tindakan yang akan dipilih dilakukan dengan menggunakan analisis manfaat dan biaya. Analisis manfaat dilakukan untuk melihat berbagai kebaikan yang muncul dari diterapkannya suatu tindakan. Sementara analisis biaya dilakukan untuk mengidentifikasi komponen biaya/kerugian apa saja yang dikeluarkan sebagai dampak dari diterapkannya suatu tindakan/regulasi. Analisis manfaat dan biaya ini dilakukan pada setiap alternatif tindakan yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis manfaat dan biaya ini berfungsi sebagai alat untuk mengklarifikasi ketepatan penyusunan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pola manfaat dan biaya yang terjadi pada tiga opsi tindakan tersebut di atas relatif seragam dan konsisten setiap tahun, maka analisis manfaat dan biaya dilakukan dengan menghitung manfaat dan biaya tahunan (rata-rata). Dalam analisis seperti ini, proses RIA tidak perlu dilakukan diskonto untuk mendapatkan nilai sekarang (*present value*). Opsi yang terbaik adalah yang menghasilkan manfaat/biaya tahunan (rata-rata) yang positif.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan tujuan yang akan dicapai, berikut analisis manfaat dan biaya yang dilakukan pada masing-masing alternatif tindakan yang dipilih.

Alternatif Pertama: Do Nothing

Alternatif Kedua: Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan Petani

Alternatif Ketiga: Penguatan Kapasitas dan Penambahan Jumlah PPL

Alternatif Keempat: Revitalisasi Peran dan Fungsi DKED

Untuk memilih alternatif tindakan yang terbaik dilakukan analisis manfaat dan biaya. Langkah pertama yang dalam analisis biaya dan manfaat adalah menentukan indikator manfaat atau biaya yang diterima oleh masing-masing *stakeholder* apabila masing-masing alternatif tindakan dilakukan. Besarnya manfaat atau biaya ditunjukkan/diukur dengan indeks skor dengan skala -3 sampai dengan 3. Dimana angka positif menunjukkan manfaat yang didapat oleh setiap *stakeholder*, dan angka negatif menunjukkan biaya/kerugian yang ditanggung oleh *stakeholders*. Sementara angka 0 (nol) menunjukkan tidak ada biaya maupun manfaat (netral), atau kondisinya tidak berubah. Semakin besar angka berarti semakin besar manfaat yang diperoleh, dan semakin kecil angka berarti biaya yang ditanggung semakin besar, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Skor Indeks Manfaat dan Biaya

Manfaat	Netral	Biaya
3 = Manfaat Besar	0 = Netral/Tidak Ada Pengaruh/ Tidak Ada Perubahan	-3 = Biaya besar
2 = Manfaat Sedang		-2 = Biaya Sedang
1 = Manfaat Kecil		-1 = Biaya Kecil

Perhitungan dan perbandingan analisis manfaat dan biaya keempat alternatif tindakan diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Ringkasan Analisis Manfaat & Biaya

KELOMPOK/ STAKEHOLDERS	MANFAAT/BIAYA	Alternatif Tindakan			
		I	II	III	IV
Pemerintah Daerah (Distanbun)	1. Optimalisasi tugas dan fungsi organisasi Distanbun.	-1	3	3	2
	2. Kemudahan koordinasi antar SKPD dan stakeholders.	-1	1	2	3
	3. Efisiensi kinerja program Distanbun.	-1	1	3	2
	4. Pelaksanaan pendampingan petani.	-1	3	3	2
	5. Kapasitas dan jumlah PPL di Distanbun.	-1	3	3	1
	6. Efisiensi pelaksanaan program bantuan ke petani oleh Distanbun.	-1	3	1	2
	7. Alokasi Anggaran (APBD) untuk penyusunan regulasi dan/atau program.	0	-2	-2	-1
	8. Biaya operasional (staf, sarana & prasarana, sosialisasi).	0	-1	-1	-1
	Sub Total Manfaat/Biaya Pemda (Distanbun)	-6	11	12	10
BKP2	1. Optimalisasi tugas dan fungsi organisasi.	-1	2	3	3
	2. Kemudahan koordinasi antar SKPD.	-1	1	2	3
	3. Optimalisasi pelaksanaan pendampingan.	-1	3	3	2
	4. Efisiensi pelaksanaan pendampingan.	-1	1	2	3
	5. Pengetahuan & keterampilan PPL.	-1	3	3	2
	6. Ketersediaan/Kecukupan PPL tiap desa.	-1	1	3	2
	7. Ketepatan sasaran program.	-1	1	3	3
	8. Biaya operasional kegiatan (pemenuhan sarana & prasarana).	0	-2	-2	-1
	9. Biaya pendampingan (kebutuhan pendamping).	0	-3	-3	-1
Sub Total Manfaat/Biaya BKP2	-7	7	14	16	
Dinas KUKM	1. Koordinasi dan sinergi program.	-1	1	0	3
	2. Ketepatan sasaran program.	-1	1	0	1
	3. Optimalisasi tugas dan fungsi dalam rangka pembinaan poktan dan gapoktan.	-1	3	0	2
	4. Sosialisasi dan deseminasi program bantuan.	-1	1	1	2
	5. Penambahan alokasi anggaran.	0	-2	0	-1
	Sub Total Manfaat/Biaya Dinas KUKM	-4	4	1	7
DPPKAD	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kegiatan usaha perdagangan kakao.	-1	2	2	2
	2. Biaya Operasional.	0	-1	-1	-1
	Sub Total Manfaat/Biaya DPPKAD	-1	1	1	1
DKED/Bappeda	1. Keberlangsungan pelaksanaan program.	-1	1	1	2
	2. Optimalisasi koordinasi dan sinergi program dengan SKPD dan stakeholders lain.	-1	1	1	3
	3. Ketepatan sasaran program.	-1	1	1	2
	4. Biaya operasional koordinasi dan kegiatan.	0	0	0	-1
	5. Kebutuhan tim teknis.	0	0	0	-1
	Sub Total Manfaat/Biaya Bappeda/DKED	-3	3	3	5
DPRD	1. Penyaluran Aspirasi Konstituen	0	1	1	3
Petani	1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani.	-1	3	3	2
	2. Penguatan kapasitas petani kunci.	-1	3	2	2
	3. Keberlangsungan program pelatihan dan pendampingan kepada petani.	-1	3	3	2
	4. Ter-advokasinya permasalahan petani.	-1	3	3	3
	5. Tingkat kualitas dan kuantitas kakao.	-1	3	3	2
	6. Akses terhadap permodalan/keuangan.	-1	3	2	2
	8. Stabilitas dan standarisasi harga kakao.	-1	2	2	2
	9. Tingkat pendapatan dan kesejahteraan.	-1	3	2	2
	10. Biaya modal produksi.	0	-3	0	0
	11. Akses informasi harga dan informasi lainnya.	-1	3	0	2
	Sub Total Manfaat/Biaya Petani	-9	23	20	19

Pedagang pengumpul	1. Kemudahan mendapatkan biji kakao.	-1	1	1	1
	2. Kualitas dan kuantitas kakao.	-1	3	2	1
	3. Standar harga kakao.	1	-1	-1	-2
	4. Keuntungan/laba.	1	-1	-1	-2
	5. Biaya operasional.	-1	-1	-1	-2
	Sub Total Manfaat/Biaya Pedagang Pengumpul	-1	1	0	-4
Pengusaha dari luar Sikka	1. Kemudahan (akses informasi) & kepastian mendapatkan bahan baku.	-1	3	2	3
	2. Kualitas dan kuantitas kakao.	-1	3	3	3
	3. Informasi standar harga kakao.	0	0	0	0
	4. Keuntungan/laba.	-1	3	2	2
	5. Biaya operasional.	-1	1	1	1
	6. Akses informasi lainnya.	-1	0	0	2
	Sub Total Manfaat/Biaya Pengusaha dari Luar Sikka	-5	10	8	11
Lembaga keuangan Koperasi	1. Kepercayaan koperasi kepada petani.	-1	3	1	3
	2. Modal/Aset koperasi.	0	2	1	2
	3. Jumlah anggota koperasi.	0	3	1	3
	4. Sosialisasi/Promosi program/produk layanan.	-1	0	0	3
	5. Biaya operasional.	0	-1	-1	1
	6. Resiko kredit macet.	-1	3	1	2
	Sub Total Manfaat/Biaya Lembaga Keuangan Koperasi	-3	10	3	14
Lembaga Keuangan Perbankan	1. Kepercayaan lembaga keuangan terhadap petani.	-1	2	1	2
	2. Sosialisasi/Promosi program/produk layanan.	-1	0	0	3
	3. Kesuksesan program/produk layanan (jumlah nasabah/kreditur).	-1	1	1	2
	4. Kepastian penjamin jika terjadi masalah.	-1	2	1	2
	5. Biaya operasional.	0	-1	-1	1
	6. Resiko kredit macet.	-1	2	1	2
	Sub Total Manfaat/Biaya Lembaga Keuangan Perbankan	-5	6	3	12
LSM Lokal dan Internasional	1. Komitmen dan dukungan dari Pemda.	-1	3	0	3
	2. Keberlangsungan pelaksanaan program.	0	2	2	3
	3. Koordinasi dan sinergi program dengan Pemda.	-1	1	2	3
	4. Optimalisasi pelaksanaan program pendampingan.	-1	3	1	3
	5. Ketepatan sasaran program.	0	2	1	3
	6. Biaya operasional kegiatan.	0	-2	1	0
	Sub Total Manfaat/Biaya LSM Lokal dan Internasional	-3	9	7	15
TOTAL MANFAAT/BIAYA		-47	86	73	109

Berikut adalah ringkasan biaya dan manfaat untuk masing-masing alternatif berdasarkan analisis diatas:

ALTERNATIF PERTAMA: DO NOTHING

Manfaat:

- Bagi pemerintah, tidak ada penambahan alokasi anggaran, artinya pemerintah tidak akan melakukan penambahan maupun pengurangan anggaran yang terkait dengan pengembangan sektor usaha kakao.
- Bagi pedagang pengumpul dengan tidak adanya tindakan upaya pengembangan program dan pengaturan sektor usaha kakao, dapat memperoleh margin keuntungan yang besar karena posisi tawar mereka dalam pembentukan harga (standar harga) kakao jauh lebih kuat dibandingkan petani.

Biaya:

- Bagi pemerintah, dengan tidak melakukan tindakan apa-apa berarti optimalisasi tugas dan fungsi organisasi masih belum optimal. Koordinasi antar SKPD juga tidak optimal. Pengetahuan PPL dari pihak pemerintah juga tidak berkembang baik dari sisi kapasitas maupun ketersediaan. Akibatnya juga sasaran program menjadi tidak tepat.
- Daya tawar petani rendah sehingga pendapatan petani semakin menurun sehingga tingkat kesejahteraan petani pun semakin mengalami penurunan.
- Bagi lembaga keuangan, resiko terjadinya kredit macet meningkat dikarenakan pendapatan petani yang berkurang.
- Ketersediaan bahan baku bagi pedagang pengumpul dan pedagang besar berkurang, akibat semakin berkurangnya produktivitas kakao.

ALTERNATIF KEDUA: PENGUATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN PETANI

Manfaat:

- Bagi Pemda/Dinas terkait, adanya program penguatan kapasitas dan kelembagaan petani berarti terjadi optimalisasi fungsi, peran dan kinerja Dinas terkait (Distanbun & BKP2). Optimalisasi kinerja tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan kemampuan teknis pendamping lapangan. Ikutan dari program ini tentunya memerlukan peningkatan kapasitas dan jumlah petugas pendamping petani (PPL).
- Adanya penguatan kapasitas dan kelembagaan petani berarti meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani baik dalam hal budidaya maupun dalam hal pengolahan pasca panen hingga pemasaran. Dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani, akan merubah pola pikir petani untuk merawat kebun dan menerapkan praktik budidaya kebun yang baik (*Good Agricultural Practices*) sehingga dapat meminimalisir datangnya serangan hama dan penyakit tanaman.
- Bagi pengusaha besar dan pedagang pengumpul, adanya peningkatan kapasitas dan kelembagaan petani akan memberikan manfaat tersendiri yakni adanya kemudahan untuk mendapatkan biji kakao dan jaminan tersedianya pasokan bahan baku biji kakao dengan kualitas yang sesuai dengan yang dikehendaki perusahaan (sesuai standar kualitas yang diinginkan).
- Bagi lembaga keuangan, meskipun secara tidak langsung mendapatkan manfaat nyata dari adanya peningkatan kapasitas dan kelembagaan petani, namun bagi lembaga keuangan sendiri, adanya peningkatan kelembagaan petani akan mampu meningkatkan kepercayaan pihak bank pada petani, mengurangi resiko kredit macet, sehingga petani mendapat kemudahan dalam mengakses permodalan.

Biaya:

- Bagi Pemda, pelaksanaan alternatif tindakan kedua ini membutuhkan dukungan alokasi Anggaran (APBD) untuk penyusunan regulasi dan/atau program, serta untuk biaya operasional (staf, sarana & prasarana, sosialisasi) dari Distanbun maupun BKP2 yang diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan ini.
- Bagi petani sendiri, dengan adanya program ini, otomatis modal produksi yang diperlukan oleh petani juga akan meningkat. Namun dengan adanya kerjasama dengan berbagai *stakeholder*, penyediaan modal produksi

tersebut dapat diupayakan secara bersama-sama sehingga beban petani tidak terlalu besar.

ALTERNATIF KETIGA: PENGUATAN KAPASITAS DAN PENAMBAHAN JUMLAH PPL

Manfaat:

- Bagi Pemda, melalui penguatan kapasitas dan jumlah PPL, sangat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dinas terkait (Distanbun & BKP2). Melalui penguatan kapasitas dan penambahan jumlah PPL, maka program-program pembinaan dinas terkait akan lebih mempermudah pencapaian target kinerja masing-masing instansi.
- Penambahan jumlah PPL akan membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada petani lebih mudah, jangkauan kerja akan semakin luas, dan beban kerja dari PPL sendiri akan lebih terbagi secara merata sehingga target capaian program dapat terlaksana dengan baik.
- Dengan meningkatnya kapasitas penyuluh, maka penyuluh dapat melakukan pembinaan dan pendampingan secara maksimal kepada petani.
- Penyuluh akan mampu memberikan transfer pengetahuan dan keterampilan mengenai praktik berkebun yang baik (*GAP*) sehingga secara tidak langsung akan dapat membantu petani dalam meningkatkan keterampilan petani tentang budidaya tanaman yang baik sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas biji kakao yang baik.
- Bagi pengusaha dan pedagang pengumpul, manfaat secara tidak langsung dari adanya peningkatan kapasitas dan jumlah PPL didapatkan melalui adanya ketersediaan pasokan biji kakao yang mencukupi dengan kualitas yang lebih baik.

Biaya:

- Bagi pemda akan berdampak pada adanya penambahan biaya operasional dinas terkait. Khususnya penambahan alokasi untuk mengadakan pelatihan kepada PPL, biaya untuk penambahan jumlah PPL, dan biaya operasional melaksanakan program pendampingan kepada petani.

ALTERNATIF KE EMPAT: REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI DKED

Manfaat:

- Keberadaan DKED yang dibentuk dengan dasar hukum yang kuat akan dapat mengikat

semua *stakeholder* pemda untuk bekerja bersama-sama dan meningkatkan intensitas koordinasi lintas *stakeholder* menjadi lebih mudah.

- Dengan peningkatan koordinasi yang lebih baik, akan tercipta sinergi program yang baik antar dinas terkait, Perbankan, Koperasi, LSM, dan stakeholders lainnya, sehingga program pembinaan yang dilaksanakan dapat berjalan secara terpadu.
- Bagi petani, adanya penguatan DKED, dimana didalamnya terdapat multi *stakeholder* baik dari pemda maupun non pemda akan memberikan manfaat yang secara langsung dapat dirasakan oleh petani. Manfaat tersebut dapat melalui program pembinaan kepada petani secara lebih komprehensif dimulai dari hilir maupun hulu. Program pembinaan kepada petani dapat dilaksanakan secara lebih terpadu, tidak tumpang tindih dan berkelanjutan.

Biaya:

- Bagi pemda, alternatif tindakan yang keempat ini akan membutuhkan dukungan dana, artinya akan ada penambahan alokasi anggaran khusus yang akan diberikan guna kelancaran kegiatan program DKED. Meskipun pemda mengeluarkan anggaran tambahan, namun manfaat yang dihasilkan lebih besar dibandingkan penambahan anggaran yang dikeluarkan.

manfaat bersih yang paling besar dibandingkan dengan tiga alternatif yang lain. Pihak yang paling mendapat kerugian dari pilihan alternatif keempat adalah pedagang pengumpul/tengkulak. Sementara stakholder yang lain lebih besar menerima manfaat dari pada biaya yang harus ditanggung. Untuk pihak pemerintah biaya yang harus ditanggung adalah dalam pembuatan regulasi maupun untuk penerapan kebijakan dan programnya. Namun demikian, bila dilihat dari eksternalitas positif yang dihasilkan dapat berupa:

- 1) Peningkatan produktivitas kakao akan meningkatkan nilai dan volume perdagangan sehingga akan terjadi peningkatan PDRB Kabupaten Sikka;
- 2) Aktivitas ekonomi yang meningkat sehingga menciptakan *multiplier effect* terhadap aktivitas sosial ekonomi;
- 3) Pendapatan masyarakat meningkat, sehingga daya beli masyarakat yang meningkat;
- 4) PDRB meningkat;
- 5) Peningkatan pendapatan masyarakat meningkat, berdampak pada pembayaran pajak yang merupakan penerimaan pemerintah.

Kombinasi dari tindakan alternatif 2, 3, dan 4 tentunya akan semakin memaksimalkan manfaat dan tercapainya tujuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman kakao di Sikka. Dalam proses implementasi kegiatan perlu dipikirkan untuk mengkombinasi atau melaksanakan program secara simultan dari tiga opsi yang telah dirumuskan.

F. ALTERNATIF TERPILIH

Berdasarkan hasil perhitungan biaya manfaat, biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh pemerintah dan petani, dan masing-masing stakeholder dapat disimpulkan bahwa alternatif **keempat (Revitalisasi Peran dan Fungsi DKED)** memberikan

G. STRATEGI IMPLEMENTASI

Untuk mengefektifkan pengembangan usaha komoditi kakao melalui revitalisasi peran dan fungsi DKED, strategi implementasi yang harus dipertimbangkan adalah seperti tabel 4 dibawah ini:

Tabel 5. Strategi Implementasi

STRATEGI IMPLEMENTASI	
1) Apakah mekanisme yang digunakan untuk alternatif tindakan terpilih	
a) Regulasi atau non regulasi	<ul style="list-style-type: none"> • Gabungan Regulasi dan Non Regulasi • Merekomendasikan hasil RIA ini (RIA Statement – RIAS) menjadi salah satu materi dalam RPJMD yang sedang disusun oleh Pemerintah Daerah.
b) Bagaimana analisis persepsi tingkat kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan para pihak (stakeholders) terhadap kebijakan yang dibuat bisa terjadi karena kebijakan ini berasal dari aspirasi para stakeholder (Bottom Up). • Adanya kesadaran bersama untuk menyelesaikan permasalahan pada usaha kakao yang merupakan komoditi yang memberi sumbangan besar bagi perekonomian daerah dan melibatkan banyak pihak.
c) Bagaimana analisis biaya manfaat	Kebijakan yang diambil berdasarkan analisa biaya dan manfaat secara kualitatif yang rasional, dan diambil berdasarkan manfaat yang lebih besar daripada biaya.
2) Bagaimana analisis kemungkinan alasan-alasan ketidakpatuhan	
a) Identifikasi kelompok-kelompok pendukung dan kelompok yang kurang mendukung	Kemungkinan stakeholder yang kurang mendukung antara lain: Pedagang pengumpul/tengkulak, dan Lembaga Keuangan Perbankan (karena ketentuan formal), sementara stakeholder yang lain mendukung.

b) Identifikasi pengetahuan stakeholder akan alternatif tindakan yang akan dijalankan	Beberapa kemungkinan ketidakpatuhan terhadap regulasi/kebijakan yang dibuat antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Derajat pengetahuan dan pemahaman kelompok yang dijadikan target regulasi terhadap regulasi yang akan dijalankan; • Derajat kemauan kelompok target untuk mematuhi baik karena insentif ekonomi, kesadaran sebagai warga negara yang baik, penerimaan terhadap tujuan regulasi, atau tekanan dari pihak regulator; dan • Derajat kemampuan kelompok target dalam memenuhi tuntutan regulasi.
3) Apakah jenis sanksi atau tindakan yang digunakan untuk mendorong kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Merekomendasikan hasil RIA ini menjadi salah satu materi dalam RPJMD yang sedang disusun oleh Pemerintah Daerah. • Merekomendasikan Tim RIA untuk ditetapkan dengan SK Bupati sebagai pihak yang melaksanakan proses dan mengawal kertas kebijakan agar opsi terpilih dapat ditindaklanjuti. • Pendekatan persuasif; • Peringatan secara verbal ataupun tertulis; • MOU antara pihak yang berkepentingan; • Sanksi administrasi; • Peningkatan beban seperti tuntutan pembuatan laporan yang lebih ketat, inspeksi yang lebih intensif, dsb
4) Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan untuk mendorong kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi Publik (FGD, Pertemuan Informal) kepada stakeholder • Pemaparan hasil/hearing dengan Bupati dan DPRD • Publikasi dilakukan melalui media cetak dan diskusi publik di media elektronik di daerah.
a) Bagaimana efektifitas sosialisasi yang dilakukan	Efektif
b) Bagaimana intensitas sosialisasi yang dilakukan	9 kali

H. KONSULTASI PUBLIK

Konsultasi publik dilakukan terhadap setiap tahapan dalam proses RIA. Konsultasi dilakukan kepada berbagai pihak terkait, antara lain: petani, kelompok tani, pedagang, lembaga keuangan (Bank dan Koperasi), pihak pemerintah daerah (Bupati dan SKPD terkait), DPRD, akademisi, media masa, dan tokoh masyarakat.

Konsultasi publik dilakukan dalam beberapa format, seperti diskusi kelompok terfokus (FGD), wawancara dengan dengan stakeholders terkait untuk verifikasi asumsi yang digunakan, publikasi melalui media

cetak (*leaflet*) dan dialog interaktif di radio. Konsultasi publik dilengkapi dengan notulen pertemuan atau hasil wawancara.

Tabel di bawah ini memaparkan kerangka metodologi rencana yang digunakan untuk konsultasi publik yang sudah dan akan dilakukan dalam berbagai tahapan proses pembuatan kebijakan. Yang perlu dicatat bahwa perencanaan konsultasi publik ini harus dianggap sebagai dokumen yang fleksibel yang dapat dirubah sesuai dengan perkembangan informasi yang diperoleh dari partisipan.

Tabel 6. Metodologi Konsultasi Publik

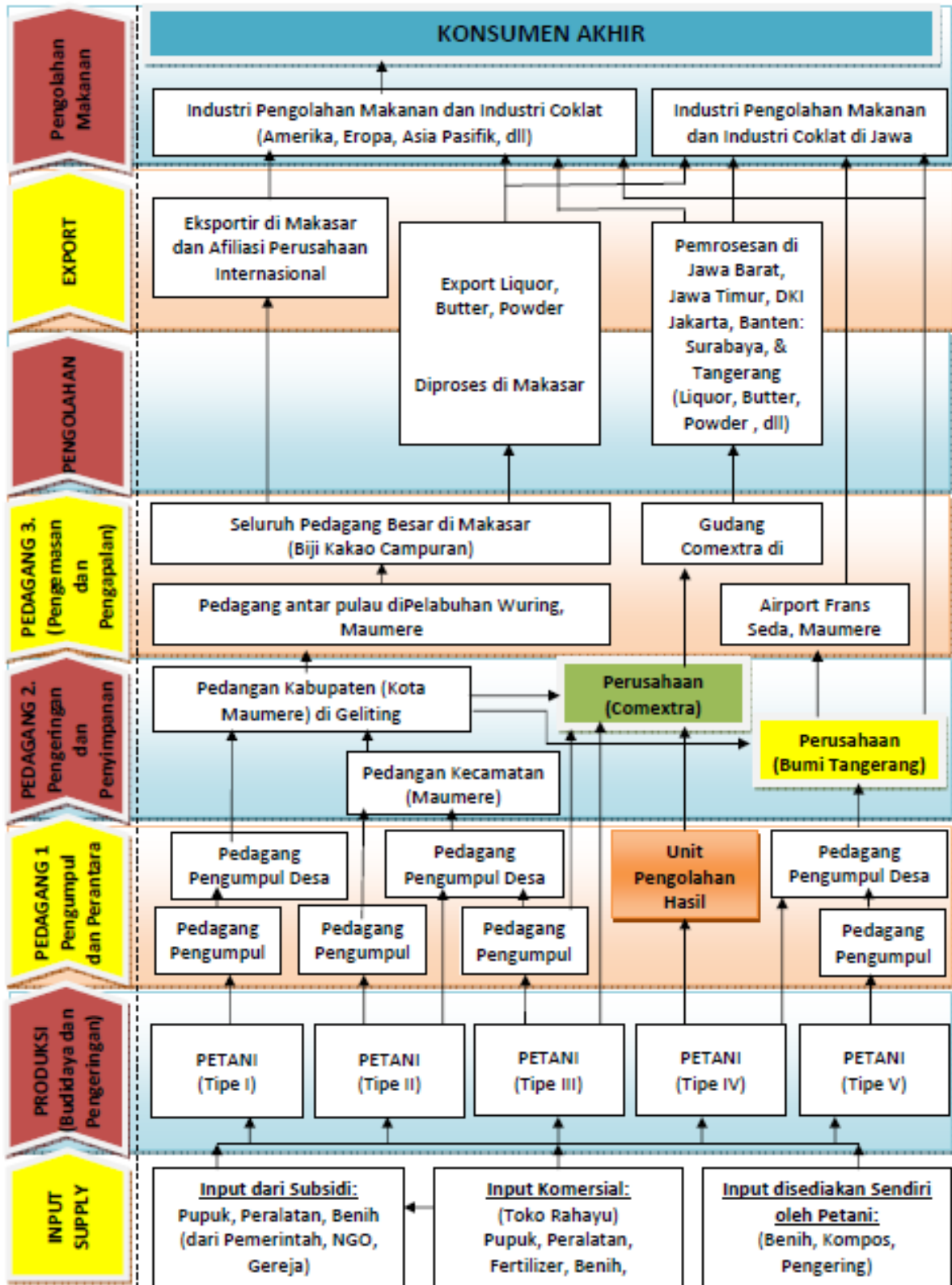
Metodologi Konsultasi Publik	
1) Identifikasi pihak mana sajakah yang relevan untuk dilakukan konsultasi	
a) Pihak mana saja yang memiliki pengaruh lebih besar atas kebijakan yang disusun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati dan Wakil Bupati 2. DPRD 3. Bappeda (DKED) 4. BKP2 5. Distanbun
b) Pihak mana saja yang memiliki pengetahuan yang luas atas permasalahan yang sedang dibahas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petani/Kelompok Tani 2. Pedagang (Buyers) 3. LSM Pendamping Petani Kakao 4. Akademisi; Peneliti/pemerhati kakao
2) Bagaimana mekanisme yang tepat dalam menyelenggarakan konsultasi publik	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan dengan stakeholders, pengamat ahli, pihak yang akan terkena akibat regulasi, dan masyarakat umum. Pertemuan tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk seperti: pertemuan kecil informal, formal (FGD) dan pertemuan besar seperti seminar dan simposium. • Penunjukan badan konsultasi yang terus menerus dikonsultasi selama proses RIA. • Publikasi draft RIAS dengan meminta pembaca untuk memberikan masukan. • Publikasi draft regulasi dengan meminta pembaca untuk memberikan masukan terhadap draf tersebut. • Publikasi draft RIA yang relevan di internet dengan meminta pembaca untuk memberikan komentar melalui email.

3) Bagaimana penggunaan atas hasil konsultasi publik	
a) Apakah ada publikasi atas hasil konsultasi publik	Publikasi dibuat dalam bentuk laporan "RIA Statement" dan laporan penelitian draf kebijakan baik berupa hardcopy yang dipublikasikan melalui media cetak, disebarakan dalam diskusi publik baik secara langsung, maupun dalam bentuk softcopy yang disebarakan pada media elektronik di daerah (internet/website Pemda).
b) Apakah hasil konsultasi publik dapat merubah isi regulasi atau permasalahan yang sedang dibahas	Ditempatkan sebagai dokumen yang fleksibel yang selalu dapat dirubah sesuai dengan perkembangan informasi yang diperoleh dari partisipan.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: PETA RANTAI NILAI KAKAO DI KABUPATEN SIKKA



LAMPIRAN 2: Matriks Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Pengembangan Rantai Nilai Kakao Di Kabupaten Sikka

FAKTA - KONDISI OBJEKTIF	SUMBER MASALAH	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
SARANA PRODUKSI:				
<ul style="list-style-type: none"> • Hanya ada dua toko komersial yang menyediakan pupuk dan saprodi. • Keterbatasan pupuk bagi petani • Keterbatasan pestisida organik bagi petani. • Keterbatasan saprodi/alat-alat seperti <i>sprayer</i> (alat penyempot pestisida), gunting bagi petani. • Kelangkaan/tidak ada bibit kakao yang cocok dengan iklim di Sikka. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Supply</i> saprodi kebanyakan diambil dari Jawa. • Pupuk dirasa oleh petani masih mahal. • Pupuk belum tersedia secara tepat; Pupuk umumnya dipakai untuk tanaman pangan. • Entries unggul tidak tersedia di tempat yang dekat. • Akses petani terhadap permodalan/kredit komersial untuk modal usaha masih sangat kurang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penyediaan sarana produksi, pupuk, bibit, dan lainnya, petani masih mengandalkan subsidi dari pemerintah, program LSM dan gereja. • Rendahnya kemampuan finansial petani untuk membeli pupuk. • Petani bisa mendapatkan pupuk dengan harga subsidi di Toko Dirgahayu dengan melampirkan surat rekomendasi dari Distanbun tetapi dengan prosedur yang sulit. • Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah dan stakeholder dalam penyediaan sarana produksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan sumber-sumber lain dalam penyediaan saprodi sehingga harga lebih kompetitif. • Perlunya kerjasama Pemda Prov/Kota dan Litbang dan Puslit Koka ((Pusat penelitian kopi dan kakao) untuk pengembangan bibit lokal. • Perlunya kerjasama dengan lembaga keuangan dalam hal permodalan, misal kredit kolektif melalui poktan. • Pembuatan dan penggunaan pupuk organik. • Koordinasi antar <i>stakeholder</i> baik di pemerintahan maupun di luar pemerintah untuk penyediaan sarana produksi melalui DKED. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemprov • Pemda Kabupaten (Distanbun, BKP2). • UPH • Perbankan • DKED

FAKTA – KONDISI OBJEKTIF	SUMBER MASALAH	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
BUDIDAYA / USAHA PERKEBUNAN:				
<p>Produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produktivitas Kakao Rendah: kuantitas dan kualitas produksi kakao mengalami penurunan sekitar 30-40% yakni produktivitas 1.500-1.700 kg/ha 300-400 kg/ha); • Produksi kakao di Sikka sampai dengan tahun 2003 = 14.333,2 ton dengan nilai nominal Rp.372.663.200.000,- → Mulai tahun 2004 produksi kakao terus menurun hingga 54% atau 7.739,93 ton atau setara kehilangan PDRB Rp.201,2 Milyar per tahun. • Mutu kakao rendah (kadar air sekitar 30-35%) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar tanaman kakao sudah tua (>20th). • Hama dan penyakit yang menyerang buah kakao: HPT (busuk buah, PBK, dan kanker batang). • Belum banyak Petani yang melakukan perawatan kebun secara baik (<i>Good Agricultural Practicess-GAP</i>). • Kurangnya kesadaran petani untuk pengelolaan, merawat kebun dan pemupukan secara optimal. • Peremajaan masih sedikit dan saat ini dilakukan dengan teknik sambung samping dan sambung pucuk. Tingkat keberhasilan teknik sambung samping dan sambung pucuk ini diakui lebih berhasil dibandingkan pembibitan. • Keengganan petani untuk melakukan penebangan dan peremajaan tanaman kakaonya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Teknik pengendalian HPT, sanitasi, dan penanganan limbah belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan petani. • Petani tidak ada/belum tahu sistem penggantian (rehabilitasi) yang tepat. • Belum memakai teknik pemupukan yang tepat. • Kurangnya pengetahuan petani untuk melakukan peremajaan dan perawatan kebun. • Tidak adanya insentif/subsidi dari pemda bagi petani yang merehabilitasi pohon, sehingga khawatir kehilangan sumber pendapatannya selama pohon belum menghasilkan kembali. • Kesulitan mendapatkan bibit yang sesuai dengan kondisi Sikka. • Kekurangan sarana prasarana produksi dan modal usaha. • Kurangnya koordinasi antar pihak yang berwenang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembinaan secara intensif kepada petani untuk mengimplementasikan <i>GAP</i>. • Perlunya peningkatan pengetahuan petani untuk menggunakan pupuk. • Peremajaan kebun mandiri melalui sambung samping/sambung pucuk oleh petani. • Penguatan kelembagaan & kapabilitas penyuluh bidang kakao secara berkelanjutan. • Mengoptimalkan koordinasi antar stakeholder yang diwadahi dalam DKED. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemda (Distanbun) • Penyuluh (BKP2) • DKED • Petani/kelompok tani. • LSM

FAKTA - KONDISI OBJEKTIF	SUMBER MASALAH	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
<p>Kelembagaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelompok tani modern masih sedikit. • Sudah ada Sekolah Lapang (SL) yang tenaga pendidiknya merupakan petani lokal yang telah diseleksi oleh Pemda dan <i>Buyer</i>, tetapi perannya belum dioptimalkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Petani umumnya anggota koperasi, tapi kegiatannya hanya simpan pinjam. • Belum ada koperasi jasa usaha dan koperasi produksi, yang dapat digunakan untuk menjadi lembaga untuk pemasaran kakao oleh petani. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok tani belum berfungsi optimal. • Keterbatasan lembaga penyedia modal. • Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar pihak (pemerintah, kelompok tani, swasta, <i>NGO</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kelompok tani modern, sebagai upaya pemberdayaan petani menjadi lebih terarah dan pembinaan dari Pemda secara kontinyu. • Penguatan UPH sebagai wadah petani untuk melakukan pemasaran bersama. • Penguatan kelompok tani melalui fasilitas dan permodalan sehingga kelompok tani dapat membeli putus kakao basah untuk dikeringkan dan fermentasi bersama secara lebih baik dan efisien. • Optimalisasi peran dan fungsi DKED dalam mengkoordinasikan stakeholder yang berkompeten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemda (DKED) • LSM • Kelompok Tani • UPH

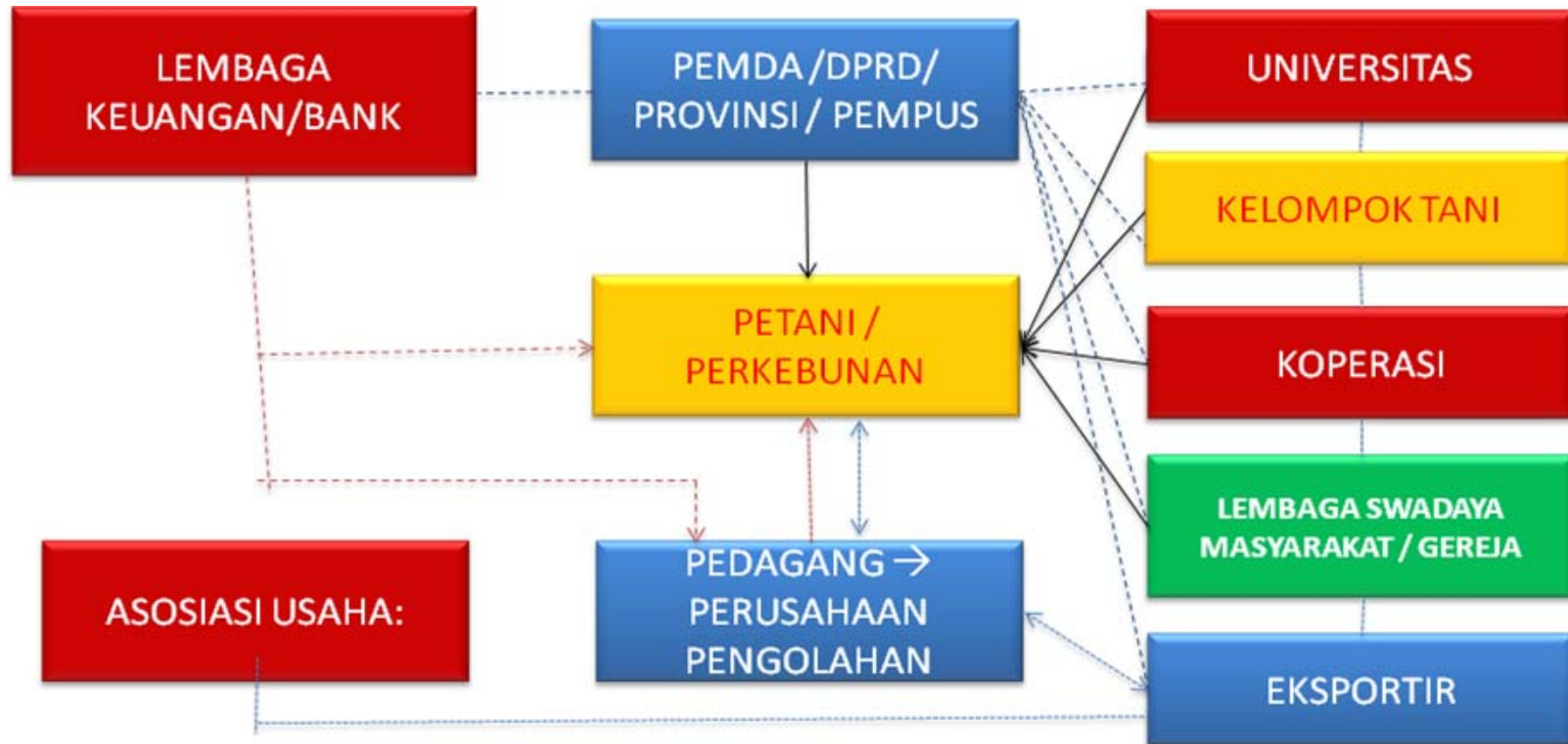
FAKTA – KONDISI OBJEKTIF	SUMBER MASALAH	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
<p>Sumber Daya Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan keterampilan petani masih terbatas. • Keterbatasan kapasitas (kemampuan) dan jumlah tenaga penyuluh (PPL) • Penguatan kapasitas petani lebih banyak dilakukan melalui program-program NGO yang ada di Sikka dengan cakupan yang terbatas dan tingkat keberlanjutan sesuai dengan durasi program. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran petani untuk menggunakan pupuk kurang. • Budidaya kakao masih dilakukan secara tradisional, pengetahuan petani masih rendah dalam hal budi daya, sanitasi, fermentasi, pemasaran, dan kualitas biji kakao yang diminati pasar. • Kurangnya kesadaran petani untuk merawat kebunnya. • Ketergantungan petani untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah/Pemda. • Budaya kelompok untuk menanam bersama “sakoseng” mulai berkurang. • Keengganan petani untuk melakukan pemasaran bersama sehingga harga tawar petani rendah. • Keengganan petani untuk datang ke pelatihan, hanya pada saat rapat dengan pemda untuk mendapat uang duduk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi dan manfaat kelompok belum dipahami. • Organisasi kelompok belum sempurna. • Koperasi belum berfungsi optimal. • Lembaga pemasaran belum terorganisir. • Program pendampingan petani yang dilakukan oleh Distanbun dan BKP2 dilakukan sebatas ketersediaan anggaran dan ketersediaan jumlah dan kapasitas PPL yang ada. • PPL yang tersedia bersifat polivalen/umum dan ketersediaan anggaran. • Dengan desain kelembagaan Distanbun menyebabkan kurang leluasa untuk pengembangan kakao khususnya untuk penyusunan program dan alokasi anggaran. • Kurangnya koordinasi antara SKPD dalam melaksanakan program dan optimalisasi sumber daya yang ada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengetahuan petani atas standar biji kakao yang dibutuhkan pabrikan dan harga biji kakao di pasaran. • Meningkatkan motivasi petani kakao untuk mengimplementasikan <i>GAP</i>. • Motivasi untuk meningkatkan luas areal perkebunan usaha mereka. • Perlu dukungan modal bagi petani dan mendorong petani untuk beli putus kakao basah petani untuk di produksi bersama. • Optimalisasi peran <i>master training</i> dan petani andalan untuk difungsikan dalam melakukan diklat kepada petani lainnya dalam satu kelompok. • Penguatan kelembagaan, dan peningkatan kapabilitas dan jumlah tenaga penyuluh bidang kakao secara berkelanjutan. • Strategi penyuluh dapat diubah dengan mendatangi petani secara berkala, sebagai upaya memberikan motivasi kepada petani dan sebagai sarana transfer teknologi yang lebih efektif. • Peningkatan dan optimalisasi koordinasi antar instansi dalam pemberdayaan petani dan kelompok tani (Distanbun, BKP2, DKED) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemda (DKED) • Penyuluh/BKP2 • UPH • Gereja/Tokoh Masyarakat • Petani • LSM • Lembaga keuangan dan perbankan.

FAKTA – KONDISI OBJEKTIF	SUMBER MASALAH	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
PENGELOLAAN PASCA PANEN				
<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan pasca panen, seperti pengeringan dilakukan secara tradisional didepan rumah/aspal tanpa memperhatikan faktor sanitasi. Idealnya diperlukan adanya lantai jemur atau para-para. • Kebanyakan petani hanya mengeringkan 1 hari kemudian langsung jual ke pedagang desa. • Baru sebagian kecil kelompok tani yang menggunakan teknologi sederhana untuk pengeringan, “tedeng koko” 	<ul style="list-style-type: none"> • Mesin pengering dari Pemerintah tidak digunakan oleh UPH, karena waktu lebih lama, mesin dengan kapasitas besar justru tidak efektif karena harus menampung kakao dari banyak petani dengan kualitas yang berbeda-beda dan biaya produksi lebih mahal. • Kendala pembuatan tedeng koko, adalah mahalnya plastik UV yang digunakan sebagai penutup. • Buyer besar seperti PT Mars & Comextra memberikan cairan khusus yang digunakan pada saat pengeringan untuk memberikan aroma lebih kuat pada kakao. 	<ul style="list-style-type: none"> • Teknologi pengeringan masih sederhana. • Petani memerlukan uang tunai (<i>cash money</i>) segera untuk memenuhi kebutuhan hidup. • Tidak melakukan fermentasi karena makan waktu dan tidak ada insentif harga • Organisasi dan manfaat kelompok belum difahami. • Kurangnya pendampingan dan penyuluhan dari Pemda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan kualitas kakao sesuai minat pasar dan bantuan alat. • Pemda bekerja sama dengan LSM, <i>buyer</i> besar atau lembaga keuangan untuk penyediaan alat pengering sehingga tiap poktan memilikinya sehingga pemanfaatan dan penggunaan alat pengering lebih luas dan yang lebih baik. • Pembinaan kelompok yang berkelanjutan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pola kemitraan 2. Penguatan lembaga pemasaran petani 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemda • LSM • Lembaga keuangan • <i>Buyer</i> • DKED

FAKTA - KONDISI OBJEKTIF	SUMBER MASALAH	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
PEMASARAN DAN HARGA JUAL				
<ul style="list-style-type: none"> • Harga kakao fluktuatif mengikuti harga bursa komoditi New York: Harga di tingkat petani adalah Rp 13 ribu untuk kakao setengah basah (pengeringan 1hari); Rp 17-18 ribu untuk tester 7 (pengeringan 3-4 hari), sementara harga jual di tingkat buyer besar Rp 21ribu. • Petani lebih suka menjual langsung kepada pedagang desa, meskipun harga rendah karena dorongan kebutuhan. • Tingkat pengetahuan petani akan kualitas biji kakao yang sesuai dengan standar / kebutuhan pasar masih rendah. • Masih ada sistem ijon dari pedagang pengepul. 	<ul style="list-style-type: none"> • Posisi tawar petani dalam menentukan harga jual kakao sangat rendah. Ada kecenderungan pedagang pengumpul biasanya mempermainkan harga. • Akses petani untuk mendapatkan informasi harga sangat terbatas. Meskipun ada fasilitas sms, namun belum semua petani memanfaatkan media sms untuk menanyakan harga internasional dan lokal yang berlaku. • Volume yang dihasilkan individu petani masih sedikit, sehingga tidak mungkin bisa langsung akses kepada pedagang besar. • Kualitas biji kakao yang dihasilkan (pasca panen) masih rendah sehingga harga jual juga rendah. • Pedagang pengepul datang tiap pagi dan sore, sehingga banyak petani yang tertarik untuk jual langsung di 	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi dan manfaat kelompok belum dipahami • Belum tersedianya koperasi yang berfungsi untuk melakukan pemasaran anggota koperasi. • Kurangnya insentif bagi petani untuk melakukan pengelolaan biji kakao lebih baik. • Tidak ada mekanisme pengaman ekonomi untuk menjamin kebutuhan hidup petani. • Kurangnya dukungan/ keterbatasan anggaran pemerintah untuk melakukan perbaikan dan pembangunan jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran Pemda dalam memfasilitasi dan mendorong petani untuk melakukan pemasaran bersama sebagai upaya peningkatan daya tawar petani. • Peningkatan peran pemda dalam mendorong dan membimbing petani untuk meningkatkan mutu kakao dengan GAP dan pengolahan pasca panen yang lebih baik, dan untuk menjual dengan kualitas biji kakao pengeringan sempurna dan sesuai standar pasar internasional sehingga harga lebih tinggi. • Melakukan pemasaran bersama baik dalam kelompok tani maupun melalui koperasi. • Penguatan UPH sebagai penampung hasil petani. • Peningkatan peran Pemda melalui strategi alternatif dengan mengembangkan regulasi yang ada seperti: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Resi gudang: untuk menampung hasil petani sebagai upaya lindung harga jika harga turun (mengadopsi praktik yang dilakukan di Ghana dan Pantai Pading) 2. Mengembangkan sistem pemasaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemda • DKED • Petani • <i>Local trader's</i> • Pedagang besar • Lembaga keuangan Perbankan • Koperasi • Petani • LSM

FAKTA - KONDISI OBJEKTIF	SUMBER MASALAH	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur yang masih kurang memadai untuk sebagian wilayah sentra produksi kakao. 	<p>tempat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • UPH belum dioptimalkan dalam rantai pemasaran. Seharusnya dalam fermentasi dan pengeringan bersama pedagang/ kelompok tani, peran UPH perlu ditingkatkan lagi dalam membeli putus kakao dalam kondisi basah. • Sebaran daerah tanaman kakao yang sangat luas sehingga secara teknis sulit untuk diupayakan pemasaran bersama, dan luasan kepemilikan lahan yang sempit sehingga produksinya kecil. 		<p>bersama yang dikelola oleh BUMD</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melaksanakan lelang forward kakao, 4. Penetapan harga jual kakao minimum, penguatan peran pemda dengan membentuk lembaga seperti Bulog atau kebijakan yang mengharuskan peran swasta membeli kakao dengan harga minimum, dll <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas petani dalam penggunaan media komunikasi dan akses terhadap informasi terkait kakao yang sedang berkembang. • Intervensi stakeholder industri konsumsi di luar Sikka. • Peningkatan efisiensi di tingkat pedagang. • Pembangunan infrastuktur jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi ke pasar. 	

LAMPIRAN 3: Peta Stakeholders Usaha Kakao di Kabupaten Sikka



Keterangan:

— : Penunjang kegiatan

- - - : Hubungan Pembinaan

..... : Hubungan Kerjasama

LAMPIRAN 4: Matriks Analisis Stakeholders Pengembangan Kakao di Kabupaten Sikka

PIHAK YANG TERLIBAT SAAT INI	PERAN SAAT INI	PERAN YANG DIHARAPKAN
Kementerian Pertanian RI	<ul style="list-style-type: none"> Membantu dalam peningkatan produktivitas kakao melalui Program Gernas Kakao (Gernas Kakao). 	<ul style="list-style-type: none"> Program lebih berkelanjutan dan tidak hanya program yang bersifat fisik melainkan juga lebih fokus pada peningkatan kapasitas petani.
PEM PROV NTT (Dinas Perkebunan Provinsi NTT)	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung program Gernas Pro Kakao, seperti pengadaan dan penyaluran kegiatan peremajaan (bibit SE, pupuk, insektisida, fungisida), rehabilitasi (pupuk, insektisida, fungisida) dan intensifikasi (pupuk, insektisida dan feromon) Mengadakan program “Anggur Merah” yang salah satu programnya adalah peningkatan kualitas hidup petani kakao. → Dilaksanakan oleh Bappeda. Membantu Pemda dalam mendapatkan/mengajukan <i>project</i> dari Pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong pemda dalam pembuatan program-program pengembangan kakao, misal pemberian insentif bagi petani kakao yang mau mengembangkan sektor kakao. Memberikan program pendampingan dan pembinaan kepada Pemda Kab/Kota dalam mengembangkan sektor kakao. Program tersebut dapat berupa program bantuan fisik maupun program kebijakan. Memberikan arah alur koordinasi yang jelas antar SKPD yang terkait dengan sektor pengembangan kakao, dalam hal ini Distanbun dan BKP2 sehingga dapat memberikan pembinaan secara terpadu kepada petani kakao di daerah. Mengurangi ketergantungan pada bantuan program pusat.
PEMDA KAB. SIKKA	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan pendanaan kegiatan pemberdayaan usaha kakao dalam porsi yang masih terbatas. Merespon kegiatan pemberdayaan kakao yang dibuat oleh Pemerintah Pusat atau NGO, meski sebatas menyesuaikan program. Saat ini belum ada program yang berkesinambungan sehingga program pengembangan kakao belum berjalan optimal. 	<p>Meningkatkan komitmen dalam pengembangan usaha Kakao, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan alokasi anggaran yang berasal dari APBD dalam rangka pengembangan usaha kakao. Dukungan regulasi untuk pengembangan usaha kakao, sesuai kebutuhan masing-masing aspek rantai nilai (Aspek Ketersediaan Input; Produksi; Tata Niaga/Pemasaran, dll)
DEWAN KERJASAMA EKONOMI DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> Mendirikan Forum Stakeholders Kakao. Peningkatan kapasitas petani dalam hal budidaya tanaman 	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan fungsi masing-masing anggota forum stakeholder kakao dalam mendorong perkembangan usaha kakao, sesuai rantai nilai dimana mereka

PIHAK YANG TERLIBAT SAAT INI	PERAN SAAT INI	PERAN YANG DIHARAPKAN
(DKED)	<p>maupun pengolahan hasil termasuk pemasaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi stakeholder, membahas dan mengadvokasi permasalahan kakao. 	berperan.
BAPPEDA KAB. SIKKA	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan program “Anggur Merah” sebagai pelimpahan tugas dari program Provinsi. • Menjadi sekretariat (Dengan SwissContact-SC) mengkoordinasikan Dewan Kerjasama Ekonomi (DKED). • Melalui forum stakeholders, Memobilisasi PPL dan menyediakan budget untuk operasional BPK dan PPL (<i>Transport dan Fee</i>). • Seleksi <i>Master trainers</i>-MT, <i>Key farmers</i> – KF, dan memobilisasi kelompok tani. • Memberikan dukungan langsung baik moril maupun material kepada kelompok SL serta menyediakan alokasi anggaran untuk SL • Monitoring implementasi SL 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembalikan fungsi Bappeda sebagai bidang perencana bukan implementor program. • Mengkoordinasikan tugas dan wewenang SKPD sesuai tupoksinya. • Memperkuat koordinasi lintas SKPD (Distanbun & BKP2). • Memperkuat peran Distanbun dalam setiap kegiatan terkait tupoksinya.
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (DISTANBUN) Kab. Sikka	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan program Gernas dengan memberikan dana <i>sharing</i> untuk membiayai pelaksanaan operasional lapangan. • Memberikan pupuk dengan harga subsidi kepada kelompok tani. • melalui program gernas menyeleksi calon petani dan lahan sebagai area lokasi kegiatan. • melalui program Gernas memberikan bantuan peralatan dan melaksanakan pemberdayaan kapasitas petani. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat program pengembangan sektor kakao secara intensif dan kontinu. • Berperan aktif dalam forum stakeholder. • Berkoordinasi dengan BKP2 dan SKPD lainnya dalam melakukan pengembangan program. • Pemda berperan dalam pemasaran dan penentuan harga pasar sehingga harga jual petani lebih baik. • Menyediakan informasi harga pasar kakao. • Menyediakan kerangka regulasi pengembangan sektor kakao secara terpadu → termasuk kerangka koordinasi dengan BKP2 atau lintas SKPD lainnya.
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Kabupaten Sikka (BKP2)	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung Gernas kakao melalui penyediaan tenaga pelaksana penyuluh pertanian (PPL). PPL ini belum optimal → tidak optimal, sebagian besar PPL adalah tenaga kontrak para petani. • Melakukan pendidikan, pelatihan dan pembinaan kepada para petani. • Dengan SC melakukan pendampingan & diklat melalui SL 	<ul style="list-style-type: none"> • BKP2 berkoordinasi dengan Distanbun dalam melakukan pendampingan dan diklat kepada petani. • Memperkuat koordinasi antara BKP2 & Distanbun • Memfungsikan kembali BKP2 sebagai Badan penyuluh yang bertugas membantu tugas Dinas teknis.

PIHAK YANG TERLIBAT SAAT INI	PERAN SAAT INI	PERAN YANG DIHARAPKAN
	(Sekolah Lapang)	
NGO/LSM : <ul style="list-style-type: none"> • Swisscontact • WVI • Caritas • YPMF • Plan 	<ul style="list-style-type: none"> • Berperan dalam peningkatan produktivitas kakao, <i>on farm</i> → <i>off farm</i> • Peningkatan kapasitas petani melalui Sekolah Lapang (SL). • Peningkatan kualitas hidup petani, pendidikan dan kesehatan. • Mengupayakan pemasaran komoditi kakao. • Pembentukan petani modern. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelibatan SKPD terkait dalam hal pelaksanaan programnya. • Koordinasi Program antar NGO dan Pemerintah Daerah.
Petani / Kelompok Tani	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kegiatan budi daya dan pasca panen • Petani belum terlalu termotivasi untuk mengikuti kegiatan Diklat (belum maksimal) 	<ul style="list-style-type: none"> • Petani tidak terus berharap pada program bantuan dari pemerintah/Pemda. • Kapasitas dan pengetahuan petani meningkat sehingga termotivasi untuk merawat kebunnya sendiri. • Petani termotivasi untuk melakukan pemasaran bersama.
Master training	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pelatihan, pembinaan dan pendampingan kepada petani terkait budidaya, produksi, pasca panen, dan pemasaran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menambah jumlah <i>master training</i> guna mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan kepada petani. • Kegiatan pelatihan dan pembinaan terhadap petani diupayakan untuk lebih intensif dan berkelanjutan.
Petani andalan (Key farmers)	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada petani terkait budidaya, produksi, pasca panen, dan pemasaran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemda perlu mengupayakan pelatihan yang lebih banyak lagi kepada petani andalan sehingga dapat membantu Pemda dalam peningkatan kapasitas petani dan pendampingan kepada petani. • Pembinaan dan pendampingan secara intensif oleh petani andalan guna peningkatan mutu kakao dan selalu memberikan motivasi kepada petani untuk selalu merawat kebunnya.
Local trader (Pedagang Desa, Kecamatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Saat ini pedagang pengumpul langsung ke rumah-rumah petani untuk membeli biji kakao basah atau setengah kering 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Local trader</i> memberikan harga yang sesuai dengan harga pasar dan kualitas. • <i>Local trader</i> memberikan informasi harga pasar yang

PIHAK YANG TERLIBAT SAAT INI	PERAN SAAT INI	PERAN YANG DIHARAPKAN
	<p>dari para petani.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pedagang pengumpul melakukan pengeringan biji kakao kembali, dan umumnya pengeringan biji kakao dilakukan selama selama sekitar 3-4 hari. • Pedagang pengumpul menjual kakao ke pengepul kecamatan atau ke pedagang Kabupaten. 	<p>benar kepada petani.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas pengetahuan <i>local trader</i> akan kualitas kakao yang baik.
Pedagang Kabupaten (-/+ 20 pelaku)	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima hasil kakao dari <i>local trader</i>, • Pedagang Kabupaten kadang memberikan bantuan modal kepada <i>local trader</i> untuk membeli kakao langsung dari petani. • Pedagang Kabupaten menjual kembali kakaonya ke pedagang besar di Makassar atau Surabaya (PT. Mars & Comextra Majora). 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan harga yang baik sesuai kualitas. • Peningkatan kapasitas pengetahuan <i>local trader</i> dan petani akan kualitas kakao yang baik. • Melakukan pembinaan kepada petani akan budidaya tanaman dan pemasaran.
PT. Mars, Comextra Majora, PT. Bumi Tangerang	<ul style="list-style-type: none"> • Melatih MT dan melakukan pendampingan kepada MT dan KF pada saat implementasi SL, termasuk mentransfer pengetahuan tentang kualitas • Informasi harga dan Pembelian • Bekerjasama dengan lembaga sertifikasi melakukan sosialisasi “Cocoa Sustainability Cerification” kepada semua stakeholder. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pelatihan secara intensif kepada para <i>local trader</i> terkait kualitas kakao yang sesuai standar kualitas yang dipesyaratkan oleh pasar.
Unit Pengolahan Hasil (UPH) Kelompok Tani	<ul style="list-style-type: none"> • Menampung hasil kakao dari petani/anggota poktan dengan harga sesuai kualitas dan volume→petani memiliki harga tawar yang lebih baik (tester 7 Rp 17-18rb). • Memberikan pendidikan kepada petani tentang kualitas kakao yang baik untuk dijual. • Melakukan fermentasi maupun pengeringan biji kakao kembali. • Menjual biji kakao kering kepada Comextra (minimal 1 ton). 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan program pemasaran bersama • Mendorong petani untuk menjual kakaonya di UPH, misal dengan mengusahakan kembali dana buliran (kerjasama dengan lembaga keuangan/pemda).
Toko Dirgahayu	<ul style="list-style-type: none"> • Supply alat-alat pertanian dan pupuk→Lebih banyak untuk tanaman pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemda diharapkan dapat mengupayakan beberapa toko lain sehingga dari sisi jarak dapat memudahkan petani dan dari sisi harga lebih bersaing. • Toko dirgahayu dapat berperan lebih jauh dalam menampung hasil-hasil pertanian dari petani sehingga

PIHAK YANG TERLIBAT SAAT INI	PERAN SAAT INI	PERAN YANG DIHARAPKAN
		dapat membantu petani dalam segi pemasaran.
Perusahaan Ekspedisi	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan pengiriman barang komoditi antar pulau (Makassar dan Surabaya).	<ul style="list-style-type: none">• berjalan sesuai mekanisme pasar.



FORDFOUNDATION

*Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Regional Autonomy Watch*

Gd. Permata Kuningan Lt.10
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C
Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
Phone: +62 21 8378 0642/53, Fax.: +62 21 8378 0643